AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i3.7651

PUBLIC VALUE IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDESA NO 7 TAHUN 2023 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI NAGARI TAEH BARUAH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Public Value of Policy Implementation of Permendesa No. 7 of 2023 on Priority Use of Village Funds in Nagari Taeh Baruah, Lima Puluh Kota Regency

Vinnanda Adita & Adil Mubarak
Universitas Negeri Padang
vinnanadaadita12@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 10, 2025	Oct 1, 2025	Oct 13, 2025	Oct 18, 2025

Abstract

This study is grounded in the importance of ensuring that the implementation of the Village Fund policy truly creates public value through tangible benefits, transparency, and community participation in *nagari* development. The research aims to analyze the implementation of Ministerial Regulation of the Ministry of Villages (Permendesa) No. 7 of 2023 on the priority use of Village Funds in Nagari Taeh Baruah and to assess the extent to which the policy generates public value for the community. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews and documentation. The study focused on four policy priorities: extreme poverty alleviation, food security strengthening, stunting prevention, and the development of Village-Owned Enterprises (*BUMNag*). The findings indicate that the Village Fund has delivered tangible benefits through the construction of agricultural infrastructure such as roads and irrigation systems, stunting prevention programs, direct cash assistance for low-income families,

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

and community economic empowerment through *BUMNag*. Policy implementation has been participatory, facilitated through *rembuk jorong* forums and *musyawarah nagari*, accompanied by transparent financial reporting. However, several challenges remain, including unequal distribution of aid, inconsistency in health programs, delays in fund disbursement, and limited capacity among local officials. The study concludes that the implementation of the Village Fund policy in Nagari Taeh Baruah has contributed to public value creation by improving welfare, fostering citizen participation, and promoting government transparency, although its effectiveness must be further enhanced to reach all community segments more equitably and sustainably.

Keywords: Public Value; Policy Implementation; Village Fund; Nagari Taeh Baruah; Community Participation.

Abstrak: Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya memastikan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa benar-benar menciptakan *public value* melalui manfaat nyata, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Permendesa No. 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan nilai publik bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Fokus kajian mencakup empat prioritas kebijakan, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pengendalian stunting, dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan dan irigasi, program pencegahan stunting, bantuan langsung tunai untuk keluarga kurang mampu, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMNag. Implementasi kebijakan berlangsung secara partisipatif melalui forum rembuk jorong dan musyawarah nagari, disertai transparansi dalam pelaporan penggunaan dana. Namun, sejumlah kendala masih ditemukan, antara lain distribusi bantuan yang belum merata, inkonsistensi program kesehatan, keterlambatan pencairan dana, dan keterbatasan kapasitas aparatur nagari. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah telah menciptakan *public value* dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, partisipasi warga, dan transparansi pemerintahan, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Public Value*; Implementasi Kebijakan; Dana Desa; Nagari Taeh Baruah; Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi fondasi utama dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional, khususnya untuk menyeimbangkan perkembangan antarwilayah dan menekan kesenjangan antara desa dan kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta keuangannya secara mandiri. Dengan adanya peraturan ini, desa memperoleh hak

otonomi yang luas dalam menyelenggarakan pengelolaan potensi dan keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat setempat (Herdiana et al., 2022). Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah Dana Desa, yang berfungsi sebagai sarana strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan membangun fasilitas infrastruktur untuk mendukung serta memperkuat pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat lebih mandiri dan berkembang secara ekonomi, serta penguatan kapasitas lembaga pemerintahan desa (O'Flynn, 2017).

Sebagai bentuk upaya mengoptimalkan pemanfaatan menurut (Kemendes PDTT., 2023) Dana Desa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam Pasal 4 regulasi ini ditetapkan empat prioritas utama, yaitu: (1) penanggulangan kemiskinan ekstrem, (2) penguatan ketahanan pangan, (3) pencegahan dan pengurangan stunting, serta (4) pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag). Kebijakan ini diharapkan mampu mengarahkan pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dengan efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Meskipun kebijakan ini memberikan arah yang jelas, implementasinya di tingkat desa tidak selalu berjalan mulus. di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, realisasi anggaran menunjukkan angka penyerapan yang tinggi, namun belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan *public value*. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat miskin ekstrem yang belum sepenuhnya terjangkau, keterbatasan dalam program pencegahan stunting, serta kapasitas aparatur nagari yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan desa

Tingginya realisasi Dana Desa memang menunjukkan capaian administratif (*output*), namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil nyata (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan penyerapan anggaran tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari. Misalnya, distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menimbulkan keluhan terkait ketidakadilan, sementara program ketahanan pangan dan kesehatan belum terlaksana secara konsisten di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah benar-benar menciptakan manfaat substantif

Bagi masyarakat, yang mencakaup dimensi ekonomi, sosial, serta aspek-aspek lainnya yang berpengaruh terhadap kesejahteraan kelembagaan.

Tabel 1. Realisasi Dana Desa Nagari Taeh Baruah Tahun 2024

Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
Penangganan Kemiskinan	209.316.237,50	187.200.000,00	89%
Ketahanan Pangan	224.371.406,00	213.355.706,00	95%
Pencegahan dan Penurunan Stunting	142.774.000,00	142.384.080,00	98%
Bumnag	7.365.700,00	7.363.700,00	99%

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Nagari Taeh Baruah,2024)

Dari laporan realisasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran berada pada kisaran 89–99 persen. Meskipun capaian ini tergolong tinggi dari sisi administratif, hal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan. Tingginya penyerapan anggaran memang menunjukkan kemampuan pemerintah nagari dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana (*output*), tetapi belum tentu mencerminkan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat (*outcome*) (Susetyo, 2020).

Di Nagari Taeh Baruah, dalam pelaksanaan kebijakan permendesa no 7 tahun 2023 ini tentang prioritas penggunaan dana desa ini masih ditemukan berbagai kendala seperti distribusi kebijakan bantuan yang belum merata, keterbatasan dalam program pencegahan stunting, serta rendahnya kapasitas aparatur nagari dalam mengelola program secara berkelanjutan. Situasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara capaian administratif dengan manfaat substantif yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Secara akademis, fenomena ini relevan ditelaah menggunakan kerangka *Public Value* dari (Moore, 1995). Teori *Public Value* memandang keberhasilan kebijakan publik tidak semata diukur dari kepatuhan aturan atau tingkat serapan anggaran, melainkan dari tiga indikator utama: manfaat substantif bagi masyarakat, legitimasi dan dukungan publik, serta kapasitas operasional pemerintah dalam pelaksanaannya (Benington & Moore, 2022). Pendekatan ini relevan digunakan untuk menilai apakah Dana Desa benar-benar menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di tingkat lokal.

Kesenjangan tersebut mendorong perlunya kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana implementasi kebijakan Dana Desa benar-benar menciptakan nilai publik (public value) di Nagari Taeh Baruah. Nilai publik yang dimaksud meliputi sejauh mana masyarakat

merasakan manfaat nyata dari program, tingkat legitimasi dan dukungan yang muncul, serta kapasitas operasional pemerintah nagari dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis nilai publik dalam pelaksanaan kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Permendesa No. 7 Tahun 2023 prioritas penggunaan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan public value bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh (Lexy J Moleong, 2019), yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam nilai publik dari implementasi kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi penelitian ini dipilih secara purposive karena Nagari Taeh Baruah memiliki tingkat realisasi Dana Desa yang tinggi, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program prioritas, seperti ketidakteraturan distribusi bantuan, keterbatasan upaya pencegahan stunting, serta rendahnya kapasitas aparatur nagari dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025, dengan fokus pada implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap penciptaan public value di tingkat masyarakat nagari.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang meliputi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Pelayanan, anggota Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), serta masyarakat penerima manfaat seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), penerima program pencegahan stunting posyandu, penerima bantuan bidang pertanian, dan pelaku BUMNag. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi nagari, laporan realisasi Dana Desa, peraturan pemerintah, serta literatur pendukung terkait kebijakan Dana Desa dan nilai publik. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai pihak dan dokumen pendukung. Analisis data mengacu pada tahapan menurut (Sugiyono, 2021), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan secara

terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga diperoleh makna yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan Dana Desa dan nilai publik yang dihasilkan di Nagari Taeh Baruah. Keabsahan data penelitian kualitatif menurut (Afrizal, 2016) menggunakan triangulasi sumber data penelitian sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang objektif.

HASIL

Nilai Publik Implementasi Kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota

Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah telah menciptakan nilai publik (public value) bagi masyarakat melalui empat prioritas utama, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pencegahan stunting, dan pengembangan BUMNag. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa nilai publik yang dihasilkan meliputi nilai substantif (manfaat nyata), legitimasi publik, serta kapasitas operasional pemerintah nagari.

1. Nilai Substantif (Manfaat Nyata bagi Masyarakat)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar rumah tangga miskin. Bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pada masa pascapandemi.

"Alhamdulillah, bantuan BLT dari nagari sangat membantu kami untuk membeli kebutuhan harian, apalagi harga sembako sekarang naik. Cuma memang, kadang ada tetangga yang tidak dapat padahal sama-sama susah,"

(Wawancara dengan Ibu penerima BLT, 22 Juni 2025).

Meskipun manfaat ekonomi langsung dirasakan, masih terdapat keluhan terkait distribusi bantuan yang belum merata akibat pembaruan data dan keterbatasan kuota penerima. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Pada bidang ketahanan pangan, Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi Engku Bilah, Tower, dan Polom Longek, yang berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.

"Setelah irigasi dibangun, air ke sawah jadi lancar. Sekarang kami bisa tanam dua kali setahun, biaya sewa pompa juga berkurang," *(Wawancara dengan Bapak petani Jorong Balai Nan Duo, 18 Juni 2025).*

Manfaat tersebut memperlihatkan adanya penciptaan nilai publik dalam bentuk peningkatan efisiensi ekonomi, walaupun belum sepenuhnya berkelanjutan karena belum disertai peningkatan kapasitas petani dalam pemasaran hasil panen.

Sementara itu, dalam aspek kesehatan, implementasi kebijakan pencegahan stunting dirasakan memberikan dampak positif melalui kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.

"Sekarang posyandu lebih aktif, ibu-ibu diberi bubur kacang hijau, telur, dan susu untuk anak balitanya. Kami juga diajari tentang pentingnya makanan bergizi," *(Wawancara dengan Bidan Desa, 24 Juni 2025).*

Kegiatan ini memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi, meskipun belum seluruh kelompok sasaran terlayani secara merata karena keterbatasan anggaran.

Dalam pengembangan BUMNag, pemerintah nagari mengelola unit usaha di bidang pertanian, perikanan, dan penyewaan alat sound system.

"Hasil penyewaan alat sound system sebagian dipakai untuk kegiatan sosial, sebagian lagi masuk ke kas BUMNag. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk nagari, tapi juga untuk warga," *(Wawancara dengan salah satu pengelola BUMNag, 20 Juni 2025).*

BUMNag menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai sosial-ekonomi karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan pemerataan manfaat ekonomi.

2. Legitimasi dan Dukungan Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah dinilai cukup partisipatif dan transparan. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan melalui rembuk jorong dan musyawarah nagari (musnag). Transparansi informasi juga dijaga dengan

pemasangan papan data penggunaan Dana Desa, laporan keuangan, dan realisasi kegiatan di kantor nagari. Tindakan ini memperkuat legitimasi pemerintah nagari di mata masyarakat.

Namun demikian, sebagian warga mengungkapkan bahwa informasi perubahan kebijakan dan kriteria penerima bantuan belum selalu disampaikan secara menyeluruh.

"Kadang kami tidak tahu kalau aturan bantuan berubah, tiba-tiba tahun ini nama kami tidak ada di daftar," *(Wawancara dengan Ibu R, masyarakat Jorong Simpang Tigo, 25 Juni 2025).*

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat transparansi sudah cukup baik, komunikasi dan pemerataan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar legitimasi kebijakan semakin kuat.

3. Kapasitas Operasional Pemerintah Nagari

Kapasitas operasional pemerintah nagari merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Nagari Taeh Baruah telah melaksanakan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan Dana Desa sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami selalu menyusun RKP Nagari berdasarkan hasil rembuk jorong. Semua kegiatan dan anggaran harus melalui musyawarah dan disetujui bersama,"

(Wawancara dengan Sekretaris Nagari, 19 Juni 2025).

Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pencairan Dana Desa dari pusat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi dan evaluasi program. Kendala ini berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program, meskipun pemerintah nagari terus berupaya meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan teknis dari Dinas PMD.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Nilai Publik Implementasi Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah

Aspek Nilai Publik	Temuan Utama	Bukti Lapangan (Kutipan/Observasi)	Tantangan yang Dihadapi
Nilai Substantif (Manfaat Nyata)	BLT membantu ekonomi masyarakat miskin; pembangunan irigasi meningkatkan produktivitas tani; program stunting meningkatkan kesadaran gizi; BUMNag memperluas pemberdayaan ekonomi.	"Alhamdulillah, BLT sangat membantu kebutuhan harian…"	Distribusi bantuan belum merata; manfaat program belum berkelanjutan.

Aspek Nilai Publik	Temuan Utama	Bukti Lapangan (Kutipan/Observasi)	Tantangan yang Dihadapi
Legitimasi dan Dukungan Masyarakat	Proses perencanaan partisipatif melalui rembuk jorong dan musyawarah nagari; transparansi melalui papan informasi.	"Kami diajak rembuk untuk usul kegiatan nagari…" (Anggota BAMUS)	Informasi kebijakan belum tersampaikan merata; partisipasi masyarakat belum menyeluruh.
Kapasitas Operasional Pemerintah Nagari	Rencana kerja dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai juknis; aparatur menjaga transparansi publik.	"Dana sering turun telat, jadi kegiatan molor walaupun bukan menjadi masalah serius…" (Kaur Keuangan)	Keterlambatan pencairan dana; keterbatasan SDM aparatur nagari.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah telah menciptakan nilai publik dalam tiga aspek utama: manfaat nyata bagi masyarakat, peningkatan legitimasi pemerintahan nagari, dan kapasitas operasional yang semakin baik. Meskipun masih terdapat hambatan teknis dan administratif, kebijakan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, keterbukaan pemerintahan, serta partisipasi warga dalam pembangunan nagari.

PEMBAHASAN

Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan kebijakan publik tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan *public value* atau nilai publik bagi masyarakat. Nilai publik mencakup manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, legitimasi yang diperoleh melalui keterlibatan warga, serta kemampuan pemerintah nagari dalam mengelola program secara efektif dan efisien (Fauzan, 2024). Penelitian ini menelaah implementasi kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah dengan tujuan menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat substantif bagi masyarakat desa melalui empat prioritas utama, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Implementasi Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah dapat dipahami melalui konsep *public value* yang dikemukakan oleh Mark H. Moore , yaitu nilai yang dihasilkan pemerintah bagi masyarakat melalui kebijakan public (Benington & Moore, 2022). Nilai publik muncul ketika pemerintah tidak hanya berfokus pada output pembangunan, tetapi juga pada legitimasi, keadilan, dan kepuasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan di Taeh Baruah telah memberikan manfaat berupa pembangunan infrastruktur, pencegahan stunting, BLT, dan penguatan BUMNag. Hal ini selaras dengan penelitian (Bauang et al., 2021) yang menemukan bahwa pelaksanaan Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Namun, masih terdapat kendala pada pemerataan manfaat dan keterlambatan pencairan dana, yang menunjukkan belum optimalnya nilai publik yang diciptakan. Maka dari itu, pendekatan *public value management* diperlukan agar implementasi kebijakan lebih berorientasi pada manfaat dan kepuasan masyarakat (Jazuli et al., 2023). Dengan demikian, pelaksanaan Permendesa ini bukan sekadar program teknokratis, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bernilai publik tinggi.

Dalam konteks lokal, pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Nagari Taeh Baruah menunjukkan bahwa proses implementasi telah menyesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis lokal. Berdasarkan hasil wawancara, perangkat nagari melaksanakan musyawarah jorong dan rembuk warga untuk menentukan prioritas penggunaan dana sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Setiawan Dwi, 2023) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan desa akan berhasil apabila dilakukan secara partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal sebagaimana di Lamongan. Di Taeh Baruah, penggunaan dana diarahkan pada pembangunan fisik dan program sosial sesuai empat prioritas Permendesa No. 7 Tahun 2023. Namun, beberapa informan mengeluhkan bahwa pelibatan masyarakat belum sepenuhnya merata di setiap jorong. Keterbatasan komunikasi dan partisipasi masyarakat menyebabkan persepsi bahwa kebijakan belum sepenuhnya adil. Maka dari itu, agar nilai publik meningkat, mekanisme perencanaan partisipatif harus lebih diperkuat dan inklusif. Upaya ini juga sesuai dengan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan public (Suwarno et al., 2024).

Nilai substantif atau manfaat nyata bagi masyarakat dalam aspek ini menggambarkan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Nagari Taeh Baruah menyalurkan bantuan tunai secara langsung kepada rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai bentuk pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya mengurangi beban ekonomi rumah tangga yang terdampak kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini terbukti membantu sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun legitimasinya, masih menunjukkan adanya permasalahan dalam proses distribusi yang belum merata. Sebagian masyarakat yang termasuk kategori miskin ekstrem tidak memperoleh bantuan karena perubahan regulasi dan keterbatasan data

penerima. Selain itu, beberapa warga yang sebelumnya memperoleh bantuan kini tidak lagi terdaftar, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Purnawan et al., 2023) yang menemukan bahwa BLT Dana Desa efektif membantu masyarakat miskin selama masa krisis ekonomi, meskipun masih terdapat masalah dalam penyaluran dan ketepatan sasaran. Nilai publik yang dihasilkan kebijakan ini telah tercipta dalam bentuk manfaat ekonomi langsung, tetapi belum sepenuhnya optimal karena legitimasi sosialnya belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pada kebijakan bidang ketahanan pangan, penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi seperti Engku Bilah, Tower, dan Polom Longek. Kebijakan ini dinilai efektif karena meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian dan memperlancar proses tanam. Mayoritas petani mengakui adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi setelah adanya irigasi tersebut. Hal ini menunjukkan penciptaan nilai publik dalam bentuk manfaat substantif (*substantive value*) yang langsung dirasakan masyarakat (Astika et al., 2022). Namun keberhasilan ini masih lebih berfokus pada aspek fisik pembangunan, dan manfaat tersebut belum diikuti dengan peningkatan kapasitas petani dalam hal inovasi dan pemasaran hasil tani sehingga dalam kondisi ini berpotensi mengurangi keberlanjutan (*sustainability*) manfaat ekonomi yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhaimin et al., 2023) mendukung temuan ini, bahwa pembangunan infrastruktur pertanian melalui Dana Desa meningkatkan hasil panen dan menurunkan biaya operasional petani.

Kebijakan pencegahan stunting menjadi prioritas penting dalam pelaksanaan Permendesa No. 7 Tahun 2023. Dana Desa digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan kesehatan seperti penyuluhan gizi, posyandu, Serta pelaksanaan kebijakan pemberian asupan gizi tambahan bagi ibu hamil dan anak balita. yang termasuk dalam kategori bayi stunting. Dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari kegiatan tersebut, khususnya peningkatan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan anak dan dengan adanya bantuan makanan tambahan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga membantu memperbaiki kondisi kesehatan anak serta mendukung proses pertumbuhan anak mereka. Kebijakan program pencegahan stunting bantuan tersebut memberikan manfaat secara signifikan bagi keluarga penerima, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Lela et al., 2023) yang menemukan bahwa penggunaan Dana Desa dalam

program gizi dan kesehatan ibu-anak efektif dalam menekan angka stunting di beberapa desa di Sumatera Barat. Menurut teori Mark Moore, efektivitas program ditentukan oleh kesinambungan pelaksanaan dan kapasitas pelaksana kebijakan. Maka dari itu, perlu dilakukan pelatihan kader posyandu dan koordinasi dengan puskesmas untuk menjamin keberlanjutan program kesehatan di tingkat nagari. Dengan hal ini menunjukkan bahwa nilai publik dalam aspek kesehatan sudah mulai terbentuk, namun masih bersifat parsial karena belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Adapun pada kebijakan BUMNag mengelola beberapa bidang usaha, yaitu pertanian, perikanan, dan penyewaan peralatan (*sound system*). Dalam bidang pertanian, sistem yang diterapkan adalah pola bagi hasil dengan pemilik lahan, sementara tenaga kerja dibayar berdasarkan sistem upah per jam. Sedangkan pada usaha penyewaan peralatan (sound system), hasil dari jasa penyewaan tidak hanya menjadi pendapatan BUMNag, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMNag Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mencakup pada dimensi sosial yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat serta pemerataan manfaat ekonomi

Selain itu, hal penting nilai publik tidak hanya diukur dari manfaat langsung yang diterima masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan memperoleh dukungan dan kepercayaan (legitimasi) dari masyarakat sebagai penerima manfaat. pelaksanaan kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah dinilai cukup transparan dan partisipatif.Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan melalui kegiatan rembuk jorong dan musyawarah nagari (musnag) untuk menentukan prioritas program yang akan didanai dari Dana Desa. Proses ini memperlihatkan adanya mekanisme akuntabilitas sosial, di mana aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara langsung (Zitri et al., 2020).

Pemerintah nagari juga berupaya menjaga transparansi pada informasi anggran dana desa ini dengan menampilkan papan data penggunaan Dana Desa, laporan keuangan, serta hasil realisasi kegiatan di kantor nagari. Tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintah nagari dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan dan tanggung jawab publik. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana Dana Desa dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah nagari untuk menciptakan tata kelola yang terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Namun dalam legitimasi dan dukunga masyarakat dalam permendesa no 7 tahun 2023 ini antara pemerintah nagari taeh baruah dan masyarakat masih belum sepenuhnya efektif. Sebagian warga menilai bahwa informasi terkait perubahan kebijakan, kriteria penerima bantuan, maupun evaluasi program belum disampaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Silitonga, 2022). Beberapa responden juga menyebutkan bahwa proses pengambilan keputusan terkadang masih didominasi oleh perangkat nagari, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata di semua jorong. Sehingga dengan Kondisi ini menunjukkan meskipun legitimasi kebijakan di Nagari Taeh Baruah telah terbentuk melalui musyawarah dan transparansi publik, tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Pemerintah nagari perlu mengoptimalkan komunikasi dua arah antara aparat dan warga, memperluas ruang partisipasi dalam setiap tahapan kebijakan, serta menindaklanjuti hasil musyawarah dengan lebih konsisten. Hal ini serupa dengan temuan penelitian (Sari & Widyawati, 2021) yang menyebutkan bahwa transparansi sering kali hanya bersifat formal tanpa diikuti dengan sosialisasi yang memadai. Berdasarkan teori *good governance* dari UNDP, transparansi harus disertai dengan akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat (Arifin et al., 2024).

Legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap implementasi Permendesa No. 7 Tahun 2023 sudah berjalan baik, karena adanya transparansi dan pelibatan publik, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan partisipasi dan kesinambungan komunikasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Mark Moore bahwa legitimasi publik merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan *public value*, karena kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting bagi keberlanjutan kebijakan publik di tingkat lokal. Kapasitas operasional merupakan elemen penting dalam menciptakan *public value*, karena efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan organisasi pemerintah dalam mengelola sumber daya, menjalankan program, serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik. Dalam konteks pelaksanaan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah, kapasitas operasional pemerintah nagari dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan koordinasi antarperangkat nagari. Kapasitas operasional pemerintah Nagari Taeh Baruah telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyusun rencana kerja Serta pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku Setiap kebijakan yang dilakukana yang bersumber dari Dana Desa dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif, yaitu melalui rembuk jorong

dan musyawarah nagari. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen RKP Nagari yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan (Silvia et al., 2024).

Dari sisi pengelolaan keuangan, aparatur nagari telah berupaya menjalankan prosedur administrasi dengan tertib. Setiap pencairan, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa dilakukan berdasarkan juknis yang berlaku. pemerintah nagari Taeh Baruah dalam mengelola Dana Desa cukup terlihat dari adanya sistem pencatatan, verifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran (SPJ) yang dilakukan secara rutin dalam peneglolahan dan desa ini Pemerintah nagari juga berupaya menjaga transparansi dengan menampilkan laporan penggunaan anggaran di papan informasi publik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas publik sebagai bagian dari upaya menciptakan nilai publik (Setiawan & Safri, 2016).

Namun demikian, perangkat nagari mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama yang memengaruhi pada pelaksanaan kebijakan di tingkat desa karena sebagian aparatur nagari belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. Meskipun demikian, upaya peningkatan kapasitas terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Hasil ini didukung oleh penelitian (Badriyah, 2017) yang menemukan bahwa rendahnya kemampuan teknis perangkat desa sering menyebabkan keterlambatan pencairan Dana Desa. Maka dari itu, pentingnya dukungan masyarakat dan pelatihan bagi teknis dalam pelaksanaan kegiatan juga membantu mengurangi hambatan di lapangan, meskipun masih perlu penguatan manajemen dan efisiensi waktu pelaksanaan.

Secara keseluruhan, implementasi Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah telah menciptakan nilai publik melalui peningkatan kesejahteraan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *Public Value* yang dikemukakan oleh Mark Moore, dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan standar kebijakan, kecukupan sumber daya, efektivitas komunikasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya (Fauziyah et al., 2021).

Selain itu juga sesuai dengan penelitian dahulu dari (Azril et al., 2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan Dana Desa diukur dari kemampuan pemerintah lokal menciptakan nilai sosial, ekonomi, dan administratif secara berimbang. Namun, keberlanjutan manfaat masih menjadi tantangan karena ketergantungan terhadap bantuan pusat dan rendahnya inovasi lokal. Teori *public value* menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan agar manfaat tidak hanya jangka pendek, tetapi menjadi budaya pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta monitoring partisipatif menjadi kunci keberlanjutan nilai publik di masa mendatang. Jika aspek-aspek ini diperkuat, kebijakan Dana Desa di Taeh Baruah dapat menjadi model implementasi yang efektif bagi nagari lain di Kabupaten Lima Puluh Kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh terkait nilai publik implmentasi kebijakan pemendesa No 7 tahun 2023 prioritas penggunaan dana desa di nagari taeh baruah baruah telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksananya. Secara nilai substantif, kebijakan ini telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pembangunan jalan dan irigasi yang menunjang aktivitas pertanian, program kesehatan untuk pencegahan stunting, Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penguatan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Dari aspek legitimasi dan dukungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan berjalan cukup partisipatif melalui kegiatan rembuk jorong, musyawarah nagari (musnag), dan musrenbang. Pemerintah nagari juga menjaga transparansi dengan menyediakan papan informasi dan laporan pertanggungjawaban publik. Namun, persepsi ketidakadilan akibat ketidakmerataan distribusi bantuan masih dapat menurunkan legitimasi kebijakan apabila tidak segera ditindaklanjuti secara adil dan terbuka. Sementara dari aspek kapasitas operasional, pemerintah nagari telah berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pendataan, verifikasi, serta penyusunan laporan anggaran secara rutin. Akan tetapi, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, perubahan regulasi yang dinamis, dan keterbatasan aparatur menjadi faktor penghambat dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Nagari Taeh Baruah telah berhasil menciptakan nilai publik (*public value***)** yang dirasakan

masyarakat, tetapi belum optimal karena masih terkendala oleh aspek pemerataan manfaat, konsistensi implementasi, dan kapasitas pelaksana kebijakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan kajian tentang public value dalam konteks implementasi kebijakan desa. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap konsep public value yang dikemukakan oleh Mark Moore (1995), dengan menekankan bahwa nilai publik tidak hanya tercermin dari hasil pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana kebijakan menciptakan rasa keadilan, partisipasi, dan transparansi di tingkat lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi pemerintah daerah dan aparatur nagari mengenai faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi Dana Desa, seperti mekanisme partisipatif, transparansi penggunaan dana, serta peningkatan kapasitas aparatur. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi Kementerian Desa dalam mengevaluasi efektivitas Permendesa No. 7 Tahun 2023 agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal, sehingga kebijakan Dana Desa benar-benar berorientasi pada penciptaan nilai publik yang berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus kajian dengan menggunakan pendekatan mixed methods agar dapat mengukur dampak kebijakan Dana Desa tidak hanya secara kualitatif tetapi juga secara kuantitatif melalui indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, penelitian lanjutan perlu membandingkan implementasi kebijakan di beberapa nagari atau desa dengan karakteristik berbeda untuk melihat variasi dalam penciptaan public value. Pendekatan komparatif ini penting agar ditemukan model implementasi terbaik yang dapat direplikasi di wilayah lain. Diperlukan juga kajian mendalam mengenai efektivitas pengawasan internal dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi penggunaan Dana Desa. Penelitian masa depan dapat mengadopsi teori governance network dan new public service untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat memperkuat penciptaan nilai publik di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan berbasis desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Pengguanaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada.

Arifin, F., Marini, A., & MS, Z. (2024). Enhancing Educational Governance: A Literature Review on Policy Management in Elementary Schools in Indonesia. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, *16*(2), 107–120. https://doi.org/10.18860/mad.v16i2.21197

Astika, Wirga, M., Yuliani, F., & Andri, S. (2022). Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), 3599–3611. https://jptam.org/index.php/jptam/issue/view/22

Azril, A., Ramadhani, F., Kuswinarno, M., & Madura, U. T. (2024). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia : Kunci Keberhasilan Organisasi Di Tengah Desa. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *2*(11), 1–17. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/905

Badriyah, R. S. (2017). Pengaruh Rekruitmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *4*(3), 297. https://doi.org/10.25157/dinamika.v4i3.661

Bauang, Z. F., Marzuki, A. U., & Labatjo, R. (2021). PELAKSANAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA LANTIBUNG KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT. *Jurnal Yustisiabel*, *5*(2), 128–143. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1268

Benington, J., & Moore, M. H. (2022). *Public Value: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.

Fauzan, A. (2024). Model Model Implementasi Kebijakan Publik. *Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 179. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf

Fauziyah, Eka, W., & Arif., L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan jalan lingkar selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, *4*(2), 672–69. https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/6829

Herdiana, D., Royani, Y., & Wahidah, I. (2022). The Public Value of e-Government at The Village Level. *Publika: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, *14*(1), 78–90. https://doi.org/10.32663/publika49647

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, *8*(April), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Kemendes PDTT. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Lela, N., Haeruddin, H., & Amelia, A. R. (2023). Hubungan Penggunaan Dana Desa dengan Penurunan Kasus Stunting di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Journal of Muslim Community Health, *4*(4), 170–183. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1421

Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Moore, M. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. MA: Harvard University Press.

Muhaimin, M., Seran, Y., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakembinangun, Kecamatan Palem, Kabupaten Sleman. *Journal of Economic, Bussines and Accounting,(COSTING)*, *6*(2), 2632–2646. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/issue/view/211

O'Flynn, J. (2017). From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications. *Australian Journal of Public Administration*, *66*(3), 353–366. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00545.x

Purnawan, H., Mardianto, M., Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, *12*(2), 288–296. https://doi.org/10.32663/3c0y2s11

Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(7), 619. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4108

Setiawan Dwi, S. M. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *3*(1), 45. http://respo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5

Setiawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *4*(1), 51–72. https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3533

Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Zahira Media Publisher.

Silvia, M., Agustini, E., Sartika, D., Nafsiah, S. N., & Julianti, E. (2024). Partisipasi Dalam Musyawarah Dana Desa: Sebagai Bagian Penting dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *2*(7), 2724–2728. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1290

Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Susetyo, I., & Dkk. (2020). *Public Value Teori dan Implementasinya dalam Manajemen Publik*. Farha Pustaka.

Suwarno, Pamungkas, B., & Munawar, A. (2024). Assistance in Public Financial Management and Thematic Village Exploration and Review of Management Potential Economical Value of Organic Waste. *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, *8*(1), 419. https://doi.org/10.12345/je.v8i1.33

Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics*, *2*(2), 164–190. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60